

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah luas, dan wilayah Indonesia juga dilewati oleh garis khatulistiwa yang mempunyai iklim tropis, karena memiliki iklim tropis yang mendukung tumbuhnya beraneka ragam flora dan fauna sehingga Indonesia memiliki potensi disektor pariwisata yang besar. Keadaan geografis berupa gunung, pantai, hutan hujan tropis, dan lautan adalah modal utama Indonesia dalam mengembangkan sektor pariwisatanya dengan memberikan fasilitas, serta layanan dan memerdayakan masyarakat yang berada disekitar daerah wisata tersebut. Seperti yang tertulis pada UU No 10 Tahun 2009, Parwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah<sup>1</sup>.

Dengan latar belakang keindahan alam dan keberagaman budaya, Indonesia menjadi negara yang cukup terkenal akan hal sektor wisata, baik itu wisata alam, ataupun wisata budaya. Sehingga wisata yang dimiliki Indonesia dapat menyumbang devisa negara yang cukup besar. Kepariwisataan juga mempunyai fungsi sebagai pemenuhan kebutuhan rohani, intelektual dan jasmani bagi setiap wisatawan dengan cara rekreasi dan berjalan-jalan serta dapat meningkatkan pendapatan negara agar dapat tercapainya kesejahteraan rakyat. Kepariwisataan Indonesia memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta pada tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa, serta mempererat persahabatan antar bangsa.

---

<sup>1</sup> UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata

Hal ini dapat dilihat pada ranking devisa pariwisata terhadap 11 ekspor barang terbesar pada tahun 2015, pariwisata menempati urutan keempat setelah minyak kelapa sawit, seperti dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 1.1 Ranking Devisa Pariwisata Terhadap 11 Ekspor Barang Terbesar Tahun 2015

2015	
Jenis Komoditas	Nilai (juta USD)
Minyak & gas bumi	18,552.10
Batu bara	15,943.00
Minyak kelapa sawit	15,385.20
<b>Pariwisata</b>	<b>12,225.89</b>
Pakaian jadi	7,371.90
Makanan olahan	6,456.30
Karet olahan	5,842.00
Alat listrik	5,644.80
Tekstil	4,996.00
Kayu olahan	3,815.80
Kertas dan barang dari kertas	3,605.50
Bahan kimia	2,807.60

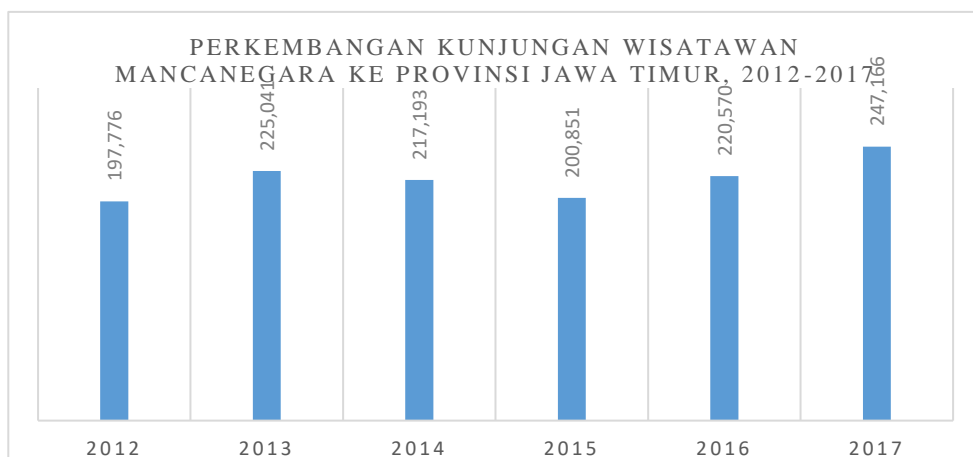
Sumber: <http://www.kemenpar.go.id>

Dengan potensi disektor pariwisata yang besar, Indonesia melakukan pembangunan dan pengembangan disektor pariwisata, karena memiliki daya tarik pariwisata yang cukup besar dikalangan wisatawan domestik ataupun mancanegara. Seperti yang tertulis pada Berita Resmi Statistik Perkembangan Pariwisata dan Transportasi Nasional Agustus 2018, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada bulan Januari-Agustus 2018 mencapai 10,58 juta kunjungan, dibandingkan dengan Januari-Agustus 2017 dengan jumlah kunjungan 9,42 juta kunjungan, jumlah kunjungan pada tahun 2018 mengalami kenaikan

12,30 persen.<sup>2</sup> Hal ini dimanfaatkan negara Indonesia untuk menambah pendapatan negara. Sehingga negara Indonesia mengembangkan sektor pariwisatanya untuk menambah pendapatan negara dengan cara meningkatkan daya tarik wisata agar wisatawan domestik maupun mancanegara berkunjung di beberapa daerah Indonesia untuk berpariwisata.

Salah satu daerah yang memiliki sektor pariwisata yang kuat adalah Provinsi Jawa Timur yang menawarkan berbagai obyek wisata alam yang sangat menarik untuk dikunjungi wisatawan. Obyek wisata alam yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur berupa pantai, air terjun, gunung aktif maupun tidak aktif, padang rumput, dan masih banyak lainnya. Hal ini dapat dilihat dari statistik pariwisata Provinsi Jawa Timur 2017 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Provinsi Jawa Timur sebesar 247.166 kunjungan yang mengalami kenaikan sebesar 12,06% dari tahun sebelumnya, berikut grafik perkembangan kunjungan wisatawan mancanegara ke Provinsi Jawa Timur,

Grafik 1.1 Perkembangan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2017



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Statistik Pariwisata Provinsi Jawa Timur 2017

Provinsi Jawa Timur memiliki tempat wisata salah satunya yakni Kabupaten Mojokerto, berbagai potensi pariwisata di Kabupaten Mojokerto menjadi magnet

<sup>2</sup> Berita Resmi Statistik Perkembangan Pariwisata dan Transportasi Nasional Agustus 2018

wisatawan mancanegara ataupun domestik untuk berpariwisata ke Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Mojokerto mempunyai wisata alam, wisata religi, wisata sejarah, dan desa wisata. Desa wisata merupakan pendekatan pengembangan pariwisata alternatif untuk membangun suatu pedesaan yang berkelanjutan dalam sektor pariwisata. Hal yang utama dalam membangun desa wisata adalah kualitas hidup masyarakat dan gaya hidup. Keadaan ekonomi, sosial dan fisik daerah pedesaan juga mempengaruhi pembangunan desa wisata, misalnya warisan budaya, kegiatan perekonomian masyarakat, bentang alam, jasa, pengalaman unik dan eksotis yang khas dari daerah tersebut. Dengan melihat beberapa hal yang mempengaruhi pemodelan desa wisata, maka desa wisata harus terus menerus secara kreatif melakukan pengembangan identitas daerah tersebut, atau mengembangkan ciri khas daerah tersebut agar dapat menjadi magnet untuk wisatawan baik mancanegara ataupun domestik untuk berkunjung di desa wisata tersebut. Menurut data potensi pengunjung wisatawan di Kabupaten Mojokerto 2018 mencapai satu juta lebih seperti tabel berikut;

Tabel 1.2 Data Potensi Pengunjung Wisatawan di Kabupaten Mojokerto 2018

No	Daya Tarik Wisata	Jumlah	
		Wisman	Wisnus
1	Wana Wisata Padusan Pacet	-	500.205
2	Air Terjun Dlundung	-	71.458
3	Petirtaan Jolotundo	120	86.777
4	Makam Troloyo	-	428.607
5	Pemandian Air Panas	24	431.097
6	Museum Trowulan	1.056	57.710
7	Ekowisata Tanjungan	-	101.568
8	Siti Inggil	-	2.414
9	Coban Canggung	-	37.647
10	Pemandian Ubalan Pacet	-	89.816
11	Candi Bajangratu	-	22.801
12	Candi Brahu	-	21.723
13	Candi Tikus	921	26.634
Total		2.121	1.878.457

Sumber: Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olah Raga

Pelibatan atau partisipasi masyarakat merupakan hal yang penting dalam upaya pengembangan desa wisata yang berkelanjutan, peningkatan mutu produk wisata pedesaan, dan pemberian pembinaan serta pendampingan bagi kelompok pengusaha setempat agar dengan adanya desa wisata ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Karena hal tersebut, Pemprov Jatim dan Pemkab Mojokerto pada tahun 2014 silam membangun 137 unit Rumah

Majapahit dalam program Kampung Majapahit di Kecamatan Trowulan dengan menelan anggaran Rp 7,4 miliar. Seperti yang telah ditetapkan di Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 260/M/2013 tentang Penetapan Satuan Ruang Geografis Trowulan sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional. Pemkab Mojokerto memanfaatkan Satuan Ruang Geografis Trowulan sebagai ikon baru wisata sejarah dengan cara merubah ratusan rumah yang berada di sekitar situs cagar budaya dengan tampilan rumah pada jaman Majapahit.<sup>3</sup>

Dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto 2016-2021 yang menyebutkan bahwa kebijakan umum yang ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk mewujudkan program pembangunan yang mendukung terwujudnya Misi 1 “Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang selaras dengan semangat revolusi mental untuk memperkuat citra PNS sebagai abdi negara sekaligus pelayan masyarakat” sebagai berikut;<sup>4</sup>

1. Peningkatan kesalehan sosial dan kerukunan antar umat beragama
2. Peningkatan kesadaran dan kecintaan antar umat beragama terhadap budaya daerah
3. Pengembangan daya tarik wisata religi untuk mendukung perekonomian daerah

---

<sup>3</sup> Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 260/M/2013 tentang Penetapan Satuan Ruang Geografis Trowulan sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional. Pemkab Mojokerto

<sup>4</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto 2016-2021

Tabel 1.3 Misi Kesatu: Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Masih sering terjadinya konflik antar umat beragama	Terciptanya peningkatan disiplin dan peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan kehidupan bermasyarakat	Meningkatnya kualitas keimanan dan ketaqwaan serta implementasinya dalam kehidupan masyarakat	Meningkatkan kesalehan sosial dan kerukunan antar umat beragama	Peingkatan kesalehan sosial dan kerukunan antar umat beragama
Belum optimalnya pembangunan keagamaan serta kesamaan pandangan pluraritas agama, suku, dan budaya			Meningkatkan kesadaran dan kecintaan antar umat beragama terhadap budaya daerah	Peningkatan kesadaran dan kecintaan antar umat beragama terhadap budaya daerah
Belum tersedianya database pengembangan adat dan sosial budaya masyarakat			Mengembangkan daya tarik wisata religi untuk mendukung perekonomian daerah	Pengembangan daya tarik wisata religi untuk mendukung perekonomian daerah
Belum berkembangnya sektor pariwisata dalam mendukung perekonomian daerah				

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto 2016-2021

Pembangunan Rumah Majapahit yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto bertujuan untuk melestarikan kawasan Majapahit di Trowulan, dan memberikan perlindungan, pengembangan, serta pemanfaatan Satuan Geografis Trowulan sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional. Cagar budaya sendiri merupakan warisan budaya bersifat benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan kawasan cagar budaya yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai yang penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan. Pada Laporan

Pengunjung Cagar Budaya Dan Museum di Jawa Timur Tahun 2016, Kawasan Cagar Budaya Mojokerto masuk peringkat 10 besar pengunjung cagar budaya dan museum, dapat dilihat pada tabel berikut;<sup>5</sup>

Tabel 1.4 Peringkat 10 Besar Pengunjung Cagar Budaya dan Museum Tahun 2016

No	Nama Obyek	Lokasi	Jenis Obyek	Jumlah
1	Makam Sunan Bonang	Tuban	Islam	2.119.575
2	Makam Ibrahim Asmoro Qondi	Tuban	Islam	2.034.567
3	Makam Sunan Giri	Gresik	Islam	1.657.317
4	Makam Sunan Drajat	Lamongan	Islam	1.403.401
5	Makam Air Mata Ibu	Bangkalan	Islam	828.758
6	Makam Sentonogedong	Kediri	Islam	216.013
7	Candi Penataran I	Blitar	Klasik	178.801
8	Pengelolaan Informasi Majapahit	Mojokerto	Museum	148.669
9	Candi Bajangratu	Mojokerto	Klasik	97.355
10	Candi Tikus	Mojokerto	Klasik	93.401

Sumber: Laporan Pengunjung Cagar Budaya dan Museum Jawa Timur 2016

. Seperti yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya<sup>6</sup>, Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya di kawasan Trowulan perlu dilakukan pembangunan rumah Majapahit dengan memperhatikan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun beberapa target sasaran yang mendapatkan bantuan dana untuk pembangunan Rumah Majapahit ini adalah Desa Sentonorejo, Desa Jatipasar, dan Desa Bejjong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto.

Pembangunan setiap masing-masing Rumah Majapahit dilakukan dengan cara mengganti bangunan depan rumah penduduk sesuai dengan gambar dan

<sup>5</sup> Laporan Pengunjung Cagar Budaya dan Museum Jawa Timur 2016

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya



Rencana Anggaran Biaya (RAB) .Dalam rangka mewujudkan terlaksananya pembangunan rumah Majapahit dikawasan Trowulan perlu memberikan bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa. Anggaran pembangunan rumah majapahit ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur dianggarkan Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk Pembangunan rumah Majapahit, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto dianggarkan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sentonorejo, Desa Bejijong, dan Desa Jatipasar Kecamatan Trowulan untuk Pembangunan Kampung Majapahit. Pembangunan rumah Majapahit ini selain untuk daya tarik wisata, rumah Majapahit dimanfaatkan juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara membuka penginapan, membuka toko kerajinan, dan masih banyak lainnya.

Pembangunan rumah Majapahit tahap pertama terdapat pro dan kontra dari masyarakat. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto pak Didik menyebutkan pro dan kontra timbul dalam pebangunan rumah Majapahit. Masyarakat menyambut program ini dengan setengah hati, karena belum mengetahui bentuk dari program ini. Adapun isu yang melemahkan program ini, antara lain;<sup>7</sup>

Isu pertama terkait dengan kepemilikan rumah yang akan dibangun menjadi rumah Majapahit menjadi milik Pemerintah. Isu yang kedua mengenai pembiayaan pembangunan rumah Majapahit yang didanai oleh pihak asing. Isu ketiga, masyarakat akan mendapatkan alokasi bantuan keuangan secara tunai untuk pemeliharaan rumah Majapahit per tahun senilai 7 sampai 10 juta. Karena isu-isu yang tersebar di masyarakat, beberapa warga yang semula menerima program rumah Majapahit mengajukan pengunduran diri dari program Kampung Majapahit.

Dalam menghadapi situasi dan kondisi yang negatif dalam keberlangsungan program Kampung Majapahit, Pemerintah Kabupaten memutuskan untuk mendatangkan pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur serta

---

<sup>7</sup> Majalah Pemkab Mojokerto Edisi April 2015. hlm 25

pihak Balai Pelestarian Cagar Budaya Trowulan untuk memberikan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut menyampaikan mengenai ketidak benaran isu-isu yang tersebar di masyarakat. Selain klarifikasi, sosialisasi tersebut juga digunakan untuk menyampaikan ketentuan-ketentuan terkait pembangunan rumah Majapahit yang telah diatur didalam peraturan bupati, diantaranya ketentuan pemilik rumah tidak diperbolehkan untuk mengubah (menambah atau mengurangi) bentuk bangunan rumah Majapahit dan wajib memelihara bangunan tersebut serta bersedia bertanggungjawab atas kerusakan-kerusakan atas bangunan tersebut.

Setelah dibangunnya rumah model Majapahitan terhitung dari tahun 2014 sampai 2018 telah terlaksana pembangunan rumah Majapahit sebanyak 596 unit di 6 desa yang berada pada Kecamatan Trowulan. Puti ingin pengelolaan kampung Majapahit bisa meniru desa wisata yang ada di Eropa. Sebagaimana setiap warga di desa wisata itu mengenakan busana tradisional asli kampung tersebut. Keunikan dari rumah-rumah Majapahit yang dilengkapi oleh pagar yang juga bergaya Majapahitan di bagian depannya saat ini belum jelas pemanfaatannya. Sehingga masyarakat memanfaatkan untuk toko kelontong, warung kopi, hingga kios bensin, dan ada pula bangunan yang dibiarkan begitu saja tidak berpenghuni<sup>8</sup>.

Selain belum optimalnya program pembangunan rumah Majapahitan terdapat permasalahan lain seperti pembangunan rumah yang bernuansa Majapahitan tidak tepat guna. Karena dari ratusan rumah yang berdiri, hanya beberapa rumah saja yang dinilai bermanfaat, padahal pembangunan rumah Majapahitan menyerap anggaran puluhan miliar<sup>9</sup>. Pembangunan rumah bernuansa

---

<sup>8</sup> DetikNews. “Kampung Majapahit Belum Optimal. Ini Saran Puti”. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4040175/kampung-majapahit-di-mojokerto-belum-optimal-ini-saran-puti>. (Diakses pada tanggal 27 Juli 2019, 05.57)

<sup>9</sup> JawaPos.com. “Rumah Majapahitan Tak Dilirik Wisatawan, Sebagian Dimakan Rayap”. <https://radarmojokerto.jawapos.com/read/2019/07/04/144437/rumah-majapahitan-tak-dilirik-wisatawan-sebagian-dimakan-rayap>. (Diakses pada tanggal 27 Juli 2019, 07.02)

Majapahitan ini diharapkan menjadi destinasi wisata yang dapat mengangkat perekonomian masyarakat Trowulan dan sekitarnya. Pembangunan kampung Majapahit diharapkan menjadi satu dari lima desa yang akan menjadi destinasi wisatawan domestik dan internasional. Namun menurut Supriyadi selaku Ketua Asosiasi Desa Wisata, rencana tersebut terlalu mukul-muluk, hal ini dikarenakan rencana tersebut tidak dibarengi dengan langkah perencanaan yang baik dan matang. Setelah lima tahun pasca pembangunan, pemerintah nyaris tidak melakukan apapun. Rumah warga yang telah direnovasi Majapahitan dibiarkan begitu saja, hal ini mengakibatkan warga kebingungan. Dari 200 rumah yang dipugar di desa ini, tak lebih dari 30 rumah saja yang pernah menjadi persinggahan wisatawan.

Seharusnya pemerintah tidak lepas tangan dalam hal pemanfaatan rumah yang telah direnovasi Majapahitan, sehingga masyarakat yang rumahnya direnovasi ataupun halaman rumahnya dibangun rumah Majapahit tidak merasa sia-sia dengan adanya pembangunan tersebut. Adanya pelatihan dan pengarahan yang dilakukan pemerintah dalam hal pemanfaatan rumah Majapahitan dengan melihat potensi daerah cagar budaya agar perekonomian masyarakat disekitar cagar budaya dapat meningkat dan dapat menarik lebih banyak lagi wisatawan yang datang ke Kampung Majapahit. Mengingat wisata budaya di daerah Trowulan sangat beragam dan bertempat dibeberapa lokasi. Sehingga wisatawan yang ingin menikmati suasana Majapahit dapat menginap.

Adapun studi terdahulu yang terkait dengan penelitian ini adalah penelitian berjudul “Kampung Majapahit (Studi Deskriptif Keberadaan Kampung Majapahit di Desa Bejjong, Kecamatan Trowulan)”<sup>10</sup>. Penelitian yang ditulis oleh Rizky Ian, skripsi ini berfokus pada dampak yang timbul dari pembangunan Kampung Majapahit. Dalam penelitian ini memakai 6 aspek menurut Riga yang dapat

---

<sup>10</sup> Syahputra, Rizky Ian. 2016. “Kampung Majapahit (Studi Deskriptif Keberadaan Kampung Majapahit di Desa Bejjong, Kecamatan Trowulan)”. Skripsi. Universitas Airlangga. Surabaya

terhubung dari berbagai aspek-aspek yang terkait dengan pembangunan, seperti halnya aspek sosial budaya, aspek ekonomi, aspek demografi, aspek lingkungan alam, aspek lingkungan binaan, aspek proyek. Adapun dipenelitian ini mengenai dampak positif dari pembangunan Kampung Majapahit, yakni semakin membuat kental aroma Majapahit di Desa Bejjong, selain itu terdapat juga dampak negatif, yakni banyaknya wisatawan dari berbagai macam budaya yang berbeda dapat mempengaruhi budaya masyarakat Desa Bejjong, yang nantinya dapat mengikis budaya asli daerah tersebut. Pada penelitian ini juga diharapkan pemerintah dan masyarakat Desa Bejjong dapat mengelola Kampung Majapahit sehingga dapat menunjang kehidupan baik dari segi sosial maupun ekonomi. Karena pembangunan Kampung Majapahit adalah untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas bagaimana kehidupan Majapahit zaman dahulu dan masyarakat juga dapat merasakannya. Namun penelitian ini belum membahas sejauh mana masyarakat mengelola rumah Majapahit agar dapat mencapai tujuan dari program pembangunan Rumah Majapahit.

Penelitian terdahulu berikutnya ditulis oleh W. Djuwita Sudjana Ramelan, dkk dengan judul “Model Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Trowulan Berbasis Masyarakat” yang berfokus pada penanganan cagar budaya yang tidak jadi tanggungjawab pemerintah saja, melainkan masyarakat juga berperan aktif dalam penanganan cagar budaya, khususnya yang terkait langsung dengan kehidupan masyarakat dengan cagar budaya yaitu pemanfaatannya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif observasi di situs-situs yang dimanfaatkan oleh masyarakat baik dikuasai oleh negara maupun yang dimiliki oleh masyarakat<sup>11</sup>. Dari hasil penelitian ini ditemui bahwa SK Mendikbud No 260/M2013 tentang Satuan Ruang Geografis Trowulan Sebagai Kawasan Cagar Budaya Tingkat Nasional harus segera direvisi, hal ini dikarenakan masih banyak mengandung informasi nama desa dan situs yang salah seperti ada nama desa yang disebutkan dua kali dan tidak diketahui dimana letaknya, ini dikarenakan

---

<sup>11</sup> Ramelan, W. Djuwita, dkk. 2015. “Model Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Trowulan Berbasis Masyarakat”. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi*. Vol 33 No.1. Juni 2015: 1-76. Depok. Universitas Indonesia

adanya salah penulisan, yang berikutnya SK Mendikbud harus segera ditindak lanjuti oleh pembentukan Undang-Undang Cagar Budaya (UUCB) agar masyarakat tidak berada dalam situasi yang tidak pasti, model pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Trowulan harus didasarkan oleh karakter budaya masyarakatnya, selain itu diperlukan juga model pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Nasional KCBN Trowulan yang berbasis masyarakat yang sejalan dengan konsep pelestarian cagar budaya, dan dalam penelitian ini juga disebutkan bahwa pemerintah kurang tanggap atas dukungan yang diberikan oleh masyarakat terhadap pemanfaatan kawasan cagar budaya, sehingga banyak pihak yang memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil keuntungan. Penelitian ini melihat sejauh mana pemerintah memanfaatkan kawasan cagar budaya yang didasarkan oleh aspek kebudayaan, ekonomi, dan sosial masyarakat daerah tersebut.

Ada pula penelitian terdahulu yang berjudul “Penerimaan Masyarakat Terhadap Program Kampung Majapahit di Kecamatan Trowulan” yang ditulis oleh Hardian Isrofi dalam tesisnya<sup>12</sup>. Penelitian ini menggunakan teori difusi inovasi dari Everett M. Rogers untuk menganalisa penerimaan masyarakat yang menjadi sasaran. Penerimaan dan penolakan terhadap inovasi pada proses adopsi inovasi dilakukan dalam lima tahap yakni; Tahap Pengetahuan, dalam tahap ini terdapat perbedaan informasi yang didapat oleh masyarakat. Perbedaan ini mengenai teknis pembangunan serta pemanfaatan rumah Majapahit; Tahap Persuasi, dalam tahap ini atribut inovasi manfaat relatif mempengaruhi sikap positif dan negatif masyarakat hal ini dikarenakan adanya penyesuaian dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat; Tahap Pengambilan Keputusan, dalam tahap ini pengambilan keputusan tidak dilakukan bersama-sama, sehingga cepat atau lambatnya dipengaruhi oleh pertimbangan dan situasi kondisi masyarakat; Tahap Implementasi, masyarakat yang menerima program rumah Majapahit belum

---

<sup>12</sup> Diptyanti, Hardian. 2018. “Penerimaan Masyarakat Terhadap Program Kampung Majapahit di Kecamatan Trowulan”. Tesis. Universitas Airlangga. Surabaya

sepenuhnya memanfaatkan bangunan yang sesuai dengan tujuan utama program; dan Tahap Pemantapan dalam tahap ini masyarakat mengalami kendala dalam memanfaatkan program pembangunan rumah Majapahit. Dalam penelitian ini hanya mengulas tentang respon masyarakat terkait dengan program rumah Majapahit yang dilakukan oleh pemerintah, dan memberikan saran kepada pemerintah untuk kedepannya memberikan program inovasi lainnya yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, namun tidak sampai membahas sejauh mana peran masyarakat dalam pengembangan program pembangunan rumah Majapahit.

*Community Development* hadir sebagai salah satu perspektif yang bisa digunakan untuk melihat sejauh mana keterlibatan dan respon masyarakat dalam menanggapi program pengembangan pariwisata yang diselenggarakan pemerintah dalam pengembangan potensi yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dengan pengembangan pariwisata yang dilakukan pemerintah yang memperhatikan prinsip dari pengembangan masyarakat dengan masyarakat yang terlibat secara aktif, maka program yang dilakukan oleh pemerintah dapat berkembang dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Teori *Community Development* digunakan dalam penelitian ini untuk melihat upaya pemerintah dalam mengembangkan potensi wisata di kawasan cagar budaya yang didasarkan pada masyarakat. Sehingga program pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah dapat bermanfaat bagi masyarakat.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas, maka didapatlah rumusan masalah yaitu “Bagaimana relevansi antara inisiatif pemerintah dengan kebutuhan masyarakat dalam pengembangan Kampung Majapahit di Desa Bejjong dan Desa JatiPasar, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto dari perspektif *Community Development* ?”

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui relevansi inisiatif pemerintah dengan kebutuhan masyarakat dalam pengembangan program Kampung

Majapahit di Desa Bejjong dan Desa JatiPasar, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto dari perspektif *community development*, yang program ini juga memiliki tujuan untuk melestarikan budaya lokal, menjaga cagar budaya di sekitar Kampung Majapahit, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto.

#### **I.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

##### **I.4.1 Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih berupa saran kepada pemerintah mengenai keberlanjutan Kampung Majapahit dengan pemberdayaan masyarakat setempat agar Kampung Majapahit dapat berjalan secara optimal dengan memafaatkan sumber daya manusia dan kebudayaan masyarakat lokal.

##### **I.4.2 Manfaat Praktis**

- 1) Bagi Peneliti, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai pengembangan program yang didasarkan pada *Community Development*
- 2) Bagi Pemerintah terkhususnya terkait dengan pemberdayaan masyarakat, diharapkan penelitian ini akan mampu menjadi acuan dalam penerapan penyelenggaraan pengembangan pariwisata di Kampung Majapahit, Desa Bejjong, dan Desa Jatipasar, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto..

#### **I.5 Tinjauan Pustaka**

##### **I.5.1 Inisiatif Pemerintah**

Inisiatif merupakan kemampuan seseorang untuk menghasilkan suatu daya cipta atau kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru atau menghasilkan

suatu pemecahan masalah<sup>13</sup>. Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ini mengandung tiga hal utama, yaitu; pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah, pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat.

Menurut Harson, pemerintah daerah memiliki eksistensi sebagai *Local Self Government* atau Pemerintah Lokal daerah dalam sistem pemerintah daerah di Indonesia adalah seluruh daerah dengan berbagai urusan otonom bagi *local self government* harus berada dalam kerangka sistem pemerintah negara<sup>14</sup>. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri, pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaan sendiri.

Program Kampung Majapahit di Desa JatiPasar dan Desa Sentonorejo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu inisiatif dari pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam menanggapi isu strategis belum berkembangnya sektor pariwisata dalam mendukung perekonomian daerah.

### **I.5.2 Relevansi Inisiatif Pemerintah**

Relevansi merupakan keterkaitan, hubungan, atau kecocokan antara dua hal yang saling terikat, jika kedua hal tersebut dicocokkan satu sama lain, maka hal tersebut saling berhubungan satu sama lain. Relevansi inisiatif pemerintah merupakan kemampuan pemerintah dalam membantu masyarakat dalam memecahkan suatu permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup lebih baik dari keadaan sebelumnya. Inisiatif yang

---

<sup>13</sup> Mardiyanto Hardono. 2008. *Intisari Manajemen Keuangan*. Jakarta. Grasindo. Hlm 23

<sup>14</sup> Sarundajang. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Cetakan ke 3. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hal 77



diambil oleh pemerintah sudah cocok atau berhubungan dengan permasalahan masyarakat.

Pada masyarakat Desa JatiPasar dan Desa Bejjong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto pemerintah mengambil inisiatif dalam meningkatkan pariwisata cagar budaya serta meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara melaksanakan program Kampung Majapahit. Program ini berbentuk pembangunan rumah atau renovasi bangunan rumah masyarakat Desa Bejjong dan Desa JatiPasar yang menyerupai rumah jaman Majapahit. Dengan program pembangunan ini diharapkan banyak wisatawan yang tertarik untuk berkunjung dan dapat meningkatkan pemasukan daerah dan perekonomian masyarakat daerah tersebut.

### **I.5.3 Kebutuhan Masyarakat**

Dalam kehidupan manusia memiliki kebutuhan agar dapat tetap bertahan hidup, mulai dari asupan makan dan minum. Fenomena inilah yang disebut dengan kebutuhan. Kebutuhan manusia menurut intensitas atau kebutuhan menurut tingkat kepentingannya terbagi menjadi tiga jenis, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan dasar manusia meliputi beberapa hal seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan tambahan yang melengkapi kebutuhan primer yang mana kebutuhan sekunder muncul ketika kebutuhan primer sudah terpenuhi. Sedangkan kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang sering disebut dengan kebutuhan akan hal yang bersifat kemewahan. Namun jenis kebutuhan tersebut bersifat relatif, setiap orang memiliki pandangan yang berbeda pada penggolongan barang tersebut adalah kebutuhan primer, sekunder atau tersier bagi dirinya. Pada zaman modern ini kebutuhan masyarakat semakin beragam dan semakin meningkat, sehingga mengakibatkan masyarakat kesulitan dalam hal menentukan kebutuhan primer dan mana kebutuhan sekunder.

Papan merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi tiap orang, seseorang memerlukan kebutuhan tersebut untuk melindungi dirinya dari berbagai ancaman. Sebagai kebutuhan dasar manusia, rumah atau papan merupakan syarat untuk

memperoleh kesejahteraan, bahkan kebutuhan papan atau rumah dapat menjadi tolak ukur kesejahteraan<sup>15</sup>. Sehingga kebutuhan akan papan atau rumah merupakan kebutuhan mendasar sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Pemerintah melakukan pemenuhan kebutuhan papan dalam rangka untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat

Menurut Maslow, pemuasan kebutuhan didorong oleh kekuatan motivasi, yaitu motivasi kekurangan (*deficiency growth*) dan motivasi perkembangan (*motivation growth*). Motivasi kekurangan sendiri merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk memenuhi kekurangan yang dialami. Sedangkan motivasi perkembangan merupakan motivasi yang tumbuh dari dasar diri manusia untuk mencapai tujuan dengan didasarkan kapasitasnya dalam berkembang. Maslow memosisikan manusia sebagai makhluk yang lemah dan terus berkembang yang memiliki potensi diri untuk suatu pencapaian dan dipengaruhi oleh lingkungan<sup>16</sup>. Kebutuhan dasar menurut Maslow meliputi;

1. Kebutuhan Fisiologis, merupakan kebutuhan yang terkait dengan kebutuhan tubuh secara biologis seperti makanan, air, oksigen, dan suhu tubuh normal. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan dasar pertama yang dicari oleh manusia untuk mencapai kepuasan hidup
2. Kebutuhan Keamanan, ketika kebutuhan pertama sudah terpenuhi, maka kebutuhan akan keamanan menjadi aktif khususnya pada anak-anak karena kesadaran mereka terhadap batasan diri masih kurang. Pada orang dewasa kebutuhan keamanan sedikit kecuali saat keadaan darurat, bencana, atau kegagalan organisasi dalam struktur sosial.
3. Kebutuhan Cinta, Sayang dan Kepemilikan, Maslow menyatakan bahwa orang mencari cara untuk mengatasi rasa kesepian atau kesendirian. Manusia membutuhkan rasa cinta, kasih sayang, dan rasa memiliki. Terdapat dua jenis cinta yaitu *Deficiency Love* dan *Being Love*

---

<sup>15</sup> Pujo, Nanang. 2010. *Dinamika Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Studi kasus: Penghuni Rumah Tipe Kecil Griya Pagutan Indah, Mataram)*. Masters thesis, Universitas Diponegoro

<sup>16</sup> Robbins SP, dan Judge. 2008. *Perilaku Organisasi*. Buku 2, Jakarta : Salemba Empat

4. **Kebutuhan Esteem**, merupakan kebutuhan akan harga diri maupun penghargaan dari orang lain. Setiap manusia memiliki kebutuhan untuk dihormati oleh orang lain, dan dipercaya oleh orang lain. Ketika esteem ini tidak tercapai, maka orang menjadi tidak percaya diri, depresi dan merasa tidak berguna
5. **Kebutuhan Aktualisasi Diri**, merupakan suatu bentuk nyata yang mencerminkan keinginan seseorang terhadap dirinya sendiri. Ketika kebutuhan ini tidak dapat terpenuhi maka akan memunculkan suatu kegelisahan

Dalam program Kampung Majapahit ini, pemerintah ingin membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, seperti perekonomian masyarakat serta daya tarik wisata cagar budaya yang nantinya dapat berdampak pada pendapatan daerah tersebut. Dengan adanya program Kampung Majapahit yang dilaksanakan oleh pemerintah diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat daerah tersebut dan dapat meningkatkan sektor pariwisata di Kecamatan Trowulan, kabupaten Mojokerto.

#### ***1.5.4 Community Development***

##### ***1.5.4.1 Pengertian Community Development***

*Community Development* merupakan proses pembentukan atau pembentukan kembali struktur-struktur yang ada di masyarakat yang memungkinkan penggunaan berbagai cara baru dalam mengkaitkan dan mengorganisasikan kehidupan sosial. *Community Development* juga dapat diartikan juga sebagai pengembangan masyarakat yang merupakan salah satu metode pekerjaan sosial yang memiliki tujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat di suatu daerah dengan melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada masyarakat dan menitik beratkan pada pada prinsip partisipasi sosial<sup>17</sup>.

Pengertian lainnya dari *community development* adalah suatu kegiatan yang membantu masyarakat yang miskin sumber daya, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya, didukung agar dapat meningkatkan kesejahteraan secara

---

<sup>17</sup> Jim Ife & Frank Tesoriero. 2008. *Community Development*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 3

mandiri. Dalam proses ini, pemerintah atau pihak eksternal berperan sebagai fasilitator yang memberikan pendampingan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pada prinsipnya masyarakatlah yang menjadi aktor dan penentu bagi program pembangunan tersebut. Sehingga ide-ide dari masyarakat merupakan dasar bagi program pembangunan ditingkat lokal, regional, bahkan dapat menjadi titik pijak bagi program nasional<sup>18</sup>.

Seorang ahli *community development*, Arthut Dunham (1958:3) menjelaskan *community development* sebagai suatu upaya yang teroganisir bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat dan juga memberdayakan masyarakat agar mampu terintegrasi dan mengarahkan diri sendiri. Selain itu Dunham juga menjelaskan bahwa pengembangan masyarakat dipraktikkan terutama melalui peningkatan organisasi swadaya dan usaha bersama individu-individu dalam masyarakat yang dibantu oleh pemerintah maupun organisasi.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *community development* sebagai gerakan sosial yang terfokus pada pembangunan desa di negara-negara berkembang yang pada penerapannya gerakan sosial ini diawali dengan adanya upaya masyarakat yang diintegrasikan dengan otoritas pemerintah guna meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya<sup>19</sup>. Sehingga masyarakat dapat terintegrasi dalam kehidupan nasional dan dapat meningkatkan kontribusinya dalam kemajuan nasional.

Berdasarkan dari serangkaian definisi diatas, maka *community development* dapat dipahami sebagai perspektif yang membahas tentang usaha pengembangan kapasitas masyarakat yang terintegrasi dengan otoritas pemerintah dalam rangka memperbaiki kehidupan masyarakat di suatu daerah agar menjadi lebih baik dengan memperbesar akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih baik dan masyarakat juga diharapkan menjadi lebih

---

<sup>18</sup> Sumardiyono, Eko. 2007. *Evaluasi Pelaksanaan Community Development dalam Perolehan Proper Hijau (Studi Kasus di PT. Pupuk Kaltim Bontang)*. Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang.

<sup>19</sup> Fredian Nasdian. 2014. *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hal 31

mandiri dengan kualitas kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik. Sehingga *community development* dalam penelitian ini menjadi perspektif untuk melihat pelaksanaan pengembangan pariwisata di Kampung Majapahit, Desa Bejjong dan Desa JatiPasar, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto dengan berfokus pada upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk membantu dan inisiatif dari masyarakat dalam hal pemanfaatannya..

#### **I.5.4.2 Prinsip-Prinsip *Community Development***

Dalam pelaksanaan pengembangan masyarakat tentu dilibatkan masyarakat dan banyak pihak lainnya untuk mengambil peran dalam proses peningkatan dan perubahan komunitas sehingga dibutuhkan seperangkat nilai yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya. Prinsip-prinsip dalam *community development* menjadi panduan dalam praktik pengembangan masyarakat itu sendiri. Prinsip dari *community development* perlu diketahui dengan jelas, karena pada kasus yang ada di lapangan, banyak program atau kegiatan yang disebut atau dikategorikan sebagai program dari pengembangan masyarakat, namun pada kenyataannya tidak memenuhi prinsip dari pengembangan masyarakat atau *community development*.

Seperti yang dijelaskan oleh Jim Ife pada tahun 1995 bahwa *community development* mempunyai memiliki 22 prinsip, dan 6 diantaranya merupakan prinsip mendasar. Enam prinsip dasar dari *community development* sebagai berikut:

##### **I.5.4.2.1 Hak Asasi Manusia**

Seperti yang dijelaskan oleh Jim Ife, pengembangan masyarakat harus dapat menjamin pemenuhan hak bagi setiap manusia untuk hidup yang layak dan baik dengan kata lain kegiatan tersebut harus melindungi dan mempertahankan hak asasi manusia yang meliputi hak mendapatkan kehidupan yang layak., hak memperoleh perlindungan keluarga, hak untuk ikut serta dalam kehidupan kultural, dan hak untuk *self-determination*<sup>20</sup>.

---

<sup>20</sup> Jim Ife & Frank Tesoriero. 2008. *Community Development*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Selain Jim Ife, John W. (Jack) Vincent II memaparkan beberapa prinsip *community development*, menurut John W. (Jack) dalam pelaksanaan *community development* melibatkan banyak pihak maka semua orang yang ada didalamnya memiliki hak untuk didengarkan atas segala ide yang disampaikan<sup>21</sup>. Selain itu, setiap masyarakat dari berbagai latar belakang memiliki hak dan berperan aktif dalam menciptakan atau membangun komunitasnya.

Dari beberapa pemaparan dai para ahli, dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat mempunyai hak yang berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan masyarakat mulai dari hak untuk berperan serta dalam kehidupan, hak untuk memperoleh perlindungan keluarga, dan hak untuk menentukan melaksanakan suatu kegiatan yang sesuai dengan kebutuhannya dan hak untuk memperoleh manfaat atas kegiatan. Karena kegiatan pengembangan masyarakat juga harus memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga dalam pelaksanaan setiap kegiatan menjamin pemenuhan dan tidak melanggar hak-hak masyarakat tersebut.

#### **I.5.4.2.2 Pembangunan Terpadu**

Jim Ife menjelaskan juga bahwa pelaksanaan atau proses *community development* tidak dapat berjalan secara parsial, tetapi harus mencakup beberapa aspek mulai dari ekonomi, politik, sosial, budaya, lingkungan, dan personal atau spiritual. Kegiatan pengembangan masyarakat jika difokuskan hanya pada satu aspek maka hasil dari kegiatan tersebut tidak seimbang dalam pembangunannya, oleh karena itu dalam pelaksanaan suatu kegiatan pengembangan masyarakat harus memperhatikan dan memperhitungkan keterkaitan satu aspek dengan aspek yang lain.

Sama dengan apa yang dipaparkan oleh PBB bahwa salah satu dari prinsip *community development* adalah ketika penyelenggaraannya secara bersama dan penyusunan program yang memiliki sifat multi-tujuan, sehingga suatu pengembangan masyarakat dapat dicapai dengan sepenuhnya dan berjalan secara

---

<sup>21</sup> Rhonda Philips & Robert H. Pittman (2009). *An Introduction to Community Development Abingdon: Routledge*. Hal 61.

seimbang. Selain itu PBB juga mengemukakan kemajuan dibidang ekonomi dan sosial pada tingkat lokal harus didukung dengan adanya pembangunan yang paralel ditingkat nasional.

Dalam praktik pengembangan masyarakat, John W.(Jack) Vincent II menjelaskan bahwa kesepakatan bersama antar warga ataupun dengan pihak lain merupakan hal yang penting untuk mewujudkan suatu keputusan yang dapat menguntungkan satu sama lain. Kesepakatan bersama menjadi hal penting karena tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pengembangan masyarakat adalah suatu kegiatan yang bersifat inklusif dan melibatkan beberapa pihak dari berbagai tingkatan dan latar belakang, sehingga dalam pelaksanaannya terjadi perbedaan pendapat dan pandangan, sehingga pihak yang terlibat baik itu masyarakat ataupun pihak lain harus saling berkompromi dengan memfokuskan pada masalah yang sedang terjadi dan solusi apa yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut<sup>22</sup>.

Dari beberapa penjelasan para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip pembangunan terpadu kembali pada pelaksanaan *community development* yang membutuhkan suatu tindakan dan kesepakatan bersama antar berbagai pihak yang terlibat dan saling terintegrasi dalam pelaksanaannya, baik dari masyarakat ataupun pihak luar yang membantu, seperti pemerintah dalam merencanakan suatu keputusan yang memiliki sifat multi-tujuan sebagai solusi atas permasalahan yang sedang terjadi di suatu daerah.

#### **I.5.4.2.3 Pemberdayaan**

*Community Development* atau pengembangan masyarakat dilakukan bertujuan untuk pemberdayaan yang dapat membantu suatu komunitas yang dalam hal ini dapat berbentuk ekstensif atau intensif dari pemerintah, seperti memberikan motivasi, penyediaan sumber daya, memberikan kesempatan, pengetahuan, serta ketrampilan dan pelatihan agar dapat meningkatkan kapasitas

---

<sup>22</sup> Rhonda Philips & Robert H. Pittman. (2009). *An Introduction to Community Development Abingdon*: Routledge. Hal 61-62.

masyarakat dalam menentukan masa depannya sendiri, mempengaruhi kehidupan masyarakat, dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan di masyarakat<sup>23</sup>.

John W. (Jack) Vincent II juga menjelaskan beberapa hal yang menjadi arah dan tujuan dilakukannya pengembangan masyarakat. John W. (Jack) Vincent II menjelaskan bahwa pengembangan masyarakat merupakan inisiatif komperhensif untuk meningkatkan semua aspek yang ada di masyarakat, mulai dari infrastruktur sosial, ekonomi, manusia, dan fisik. Sehingga didalam pengembangan masyarakat mempunyai banyak upaya yang dilakukan untuk membangun atau membantu masyarakat<sup>24</sup>.

PBB juga menjelaskan salah satu prinsip *community development* bahwa suatu program pengembangan masyarakat harus mendasari penyelenggaraanya dengan tujuan identifikasi, motivasi, dan pelatihan bagi pimpinan lokal, sehingga dukungan intensif dan ekstensif dari pemerintah dibutuhkan agar suatu program pengembangan masyarakat berjalan dengan efektif<sup>25</sup>.

Dari beberapa penjelasan para ahli diatas, maka pemberdayaan dalam *community development* merupakan tujuan atau arah dari dilaksanakannya suatu kegiatan pengembangan masyarakat. Prinsip pemberdayaan ini terkait dari inisiatif bantuan ataupun dukungan dari pemerintah kepada masyarakat seperti pemberian kesempatan, sumber daya, dan keterampilan, hingga memberikan tanggungjawab yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat atau kepemimpinan komunitas, sehingga dapat menentukan masa depannya sendiri dalam menyelesaikan permasalahannya sendiri dan lebih bisa mandiri dalam berbagai aspek atau bidang.

#### **I.5.4.2.4 Keberlanjutan**

Kegiatan *community development* atau pengembangan masyarakat harus juga memperhatikan keberlangsungan lingkungan melalui usaha untuk

---

<sup>23</sup> Jim Ife & Frank Tesoriero. 2008. *Community Development*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

<sup>24</sup> Rhonda Philips & Robert H. Pittman. (2009). *An Introduction to Community Development*. Abingdon: Routledge. Hal 69

<sup>25</sup> Fredian Nasdian. 2014. *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hal 49-58



meminimalisir penggunaan sumber daya yang tidak bisa digantikan, melaksanakan kegiatan yang hasilnya tidak menimbulkan dampak yang buruk bagi lingkungan hidup manusia dan berupaya mencari alternatif serta tatanan ekologis, ekonomi, sosial dan politik yang berkelanjutan<sup>26</sup>.

Didalam *community development*, prinsip keberlanjutan sangatlah berkaitan erat dengan praktik penggunaan lahan, perlindungan akan sumber daya alam dan lainnya yang dimiliki, serta gaya hidup masyarakat. Dalam pelaksanaan pengembangan masyarakat, keberlanjutan dapat diwujudkan dengan memperhatikan keseimbangan ekologis dan keadilan sosial melalui pengarahannya kepada masyarakat untuk meminimalisir pemanfaatan sumber daya secara berlebihan untuk memperoleh keuntungan, mengurangi polusi, serta melakukan konservasi terhadap sumber daya alam.

Keberlanjutan dalam hal pengembangan masyarakat, mengarah pada pemakaian sumber daya oleh masyarakat agar gapat memenuhi kebutuhannya sekaligus untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada dapat tersedia untuk generasi mendatang, berusaha untuk mempertahankan kemampuan alam agar dapat bermanfaat dari waktu ke waktu dengan cara meminimalisir limbah, meminimalisir polusi, serta meningkatkan efisiensi dan mengembangkan sumber daya lokal untuk meningkatkan sektor ekonomi lokal<sup>27</sup>.

Berdasarkan pemaparan tersebut, prinsip keberlanjutan dalam *community development* terkait pada pelaksanaan suatu program pembangunan dengan memperhatikan kondisi lingkungan yang berkaitan dengan gaya hidup masyarakat, perlindungan akan sumber daya alam dan penggunaan lahan yang ada dengan memberikan arahan kepada masyarakat agar dapat menjaga keseimbangan ekologis dan keadilan sosial melalui penggunaan sumber daya dengan bijak, mengurangi limbah, dan mencegah terjadinya polusi dan juga meningkatkan

---

<sup>26</sup> Jim Ife & Frank Tesoriero. 2008. *Community Development*. Yogyakarta: Pustaka Belajar

<sup>27</sup> Mark Roseland. 2012. *Towards Sustainable Communities: Solutions for Citizen & Their Governments*. Gabriola Island: BC New Society Publishers. [diakses pada tanggal 20 Oktober 2019]. <https://www.newsociety.com/Books/T/Toward-Sustainable-Communities2>. ISBN:9780865717114

efisiensi serta mengembangkan sumber daya lokal untuk meningkatkan ekonomi lokal.

#### **I.5.4.2.5 Partisipasi**

Suatu pengembangan masyarakat atau *community development* harus mengupayakan partisipasi masyarakat terhadap masalah yang terjadi didalam kehidupan bermasyarakat secara maksimal dengan tujuan untuk membuat semua orang terlibat secara aktif dalam proses pengembangan masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakat dapat memperoleh proses belajar satu sama lain dan mengubah kegiatan tradisional yang eksklusif menjadi suatu kegiatan yang partisipatif dengan cara alamiah serta program-program pembangunan akan menjadi lebih siap dalam basis yang lebih luas dalam penjaminan pencapaian tujuan jangka panjang.

John W. (Jack) Vincent II menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik harus bersifat terbuka. Bentuk partisipasi masyarakat ada bermacam seperti menghadiri rapat, bergabung dalam satuan tugas dan masih banyak lainnya<sup>28</sup>. Warga masyarakat lebih dapat berpartisipasi aktif dalam menciptakan atau membuat kembali komunitasnya dimana terkait dengan penggunaan hak dari masyarakat itu sendiri agar dapat mengutarakan pendapatnya dan dapat didengar dalam hal pengembangan komunitasnya tanpa memandang latar belakang masyarakat itu sendiri.

Selain John W. (Jack) Vincent II, PPB juga menjelaskan bahwa pengembangan masyarakat berfokus pada partisipasi masyarakat yang meningkat dalam hal melihat suatu masalah yang sedang terjadi di lingkungannya, ataupun melakukan revitalisasi terkait bentuk-bentuk yang ada pada pemerintah lokal yang tidak berfungsi dengan baik<sup>29</sup>.

---

<sup>28</sup> Rhonda Philips & Robert H. Pittman. (2009). An Introduction to *Community Development*. Abingdon: Routledge

<sup>29</sup> Ferdinan Nasdian. 2014. Pengembangan Masyarakat. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hal 46-47

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya pengembangan masyarakat, partisipasi merupakan hal penting. Masyarakat memiliki hak untuk terlibat dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan di komunitasnya yang nantinya didukung dengan kesempatan atau pemberian ruang secara terbuka kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat menyampaikan seluruh ide atau gagasannya dalam upaya penyelesaian masalah untuk memajukan komunitasnya, dan menjamin pengembangan masyarakat dapat berjalan dengan lancar sehingga dapat mencapai tujuan jangka panjang.

#### **I.5.4.2.6 Kemandirian**

Prinsip *community development* satu ini memiliki maksud bahwa masyarakat harus berusaha untuk menggunakan sumber daya yang ada, baik itu sumber daya keuangan, alam, teknik, dan manusia yang dimiliki<sup>30</sup>. Sehingga masyarakat tidak tergantung kepada dukungan eksternal, sehingga terwujud suatu proses pembangunan yang berkelanjutan.

Pendapat lain disampaikan juga oleh John W. (Jack) Vincent II bahwa fokus dari pengembangan masyarakat tidak lain untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar saling berdiskusi atau berdialog secara mandiri dan efektif dalam rangka memecahkan masalah yang sedang terjadi. Menurut John W, swadaya dan tanggung jawab sangat diperlukan, hal ini agar suatu pengembangan masyarakat berjalan dengan lancar dan berhasil, karena tidak ada yang lebih mengetahui ataupun lebih komitmen untuk melakukan suatu perubahan selain mereka yang tinggal atau komunitas yang menjadi sasaran dari dilaksanakannya kegiatan tersebut<sup>31</sup>. Pihak eksternal hanya membantu beberapa pelaksanaan pengembangan masyarakat, tidak bisa melakukan semua hal yang diperlukan oleh masyarakat untuk mewujudkan pemanfaatan semua potensi, sehingga pemerintah atau pihak luar lainnya hanya berperan untuk mengatur masyarakat agar dapat menyadari kemampuan, kekuatan, dan sumber daya yang mereka miliki sedangkan masyarakat lah yang menjalankan proses pengembangan tersebut. Arah

<sup>30</sup> Jim Ife & Frank Tesoriero. 2008. *Community Development*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

<sup>31</sup> Rhonda Philips & Robert H. Pittman. (2009). *An Intruduction to Community Development*. Abingdon: Routledge. Hal 60

pengembangan masyarakat berkaitan dengan menumbuhkan inisiatif atas semua urusan dalam masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui kemampuan, peluang, kekuatan dan juga ancaman yang ada dilinkungannya, sehingga dasar dari inisiatif berhasil ketika terjalinnya kerjasama dalam memecahkan suatu masalah umum.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kemandirian dalam *community development* dapat dipahami sebagai fokus pelaksanaan kegiatan pengembangan masyarakat, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat untuk melihat lingkungan sekitar dan menyelesaikan masalah merupakan hal yang penting. Namun disisi lain inisiatif masyarakat untuk bergerak, melihat sumber daya sampai menyelesaikan suatu masalah menjadi hal yang ditekankan, karena masyarakatlah yang lebih mengetahui untuk melakukan perubahan pada lingkungan atau komunitasnya. Dalam pelaksanaan kemandirian memiliki keterkaitan satu sama lain dengan pemberdayaan, dimana pemerintah yang mengatur dan memberikan suatu dukungan agar masyarakat dapat menyadari potensi dan sumber daya yang dimiliki, namun yang menjalankan pemanfaatan itu sendiri adalah masyarakat.

## **I.5.5 Pariwisata**

### **I.5.5.1 Pengertian Pariwisata**

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mendefinisikan pariwisata merupakan berbagai bentuk kegiatan wisata dengan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang telah disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah<sup>32</sup>. Kepariwisata sendiri memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan yang melakukan rekreasi dan perjalanan, serta dapat juga meningkatkan pendapatan negara ataupun daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Daerah tujuan pariwisata atau yang disebut dengan destinasi pariwisata, merupakan kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat berbagai daya tarik wisata,

---

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Kepariwisata juga menjelaskan kawasan strategis pariwisata merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya, pertahanan dan keamanan, serta pemberdayaan sumber daya alam, dan daya dukung lingkungan hidup.

Selain itu, Kepariwisata juga memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan, dan lain-lain<sup>33</sup>. Kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal, memberikan manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas, memelihara kelestarian alam dan lingkungan, serta memberdayakan masyarakat setempat.

### **I.5.5.2 Pengembangan Pariwisata**

Seperti yang tertulis di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata bahwa pembangunan atau pengembangan pariwisata dilaksanakan berdasarkan dasar asas manfaat, kekeluargaan, kesetaraan, kesatuan, dan demokratis<sup>34</sup>. Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri dari rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/ kota. Dalam pengembangan pariwisata dilaksanakan, pemerintah harus menetapkan kawasan

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

strategis pariwisata. Hal ini dilakukan karena kawasan strategis pariwisata memiliki tujuan agar terbentuknya partisipasi dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu kawasan strategis harus juga memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat.

Selain itu, pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan pasal 19 menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja/buruh pariwisata, dan/atau berperan aktif dalam proses pembangunan atau pengembangan kepariwisataan. Pada pasal 30 juga diatur mengenai kewenangan pemerintah kabupaten/kota seperti menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota, menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota, menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota, melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata, mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya, memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya, memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru, menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota, memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada pada wilayahnya, menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata dan juga mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

### **I.5.5.3 Pilar Pengembangan Pariwisata**

Adanya desa wisata merupakan suatu fenomena yang menarik di Indonesia. Pengembangan desa wisata Jika pariwisata dilihat sebagai jenis usaha yang memiliki nilai ekonomi, maka pariwisata merupakan suatu proses yang dapat menciptakan nilai tambah terhadap barang dan atau jasa. Potensi pengembangan suatu destinasi pariwisata dapat dikaji melalui keterkaitan pendekatan faktor *demand* (pengunjung) dan *supply* sebagai berikut:

### 1.5.5.3.1 Daya Tarik Wisata (*Attraction*)

Daya Tarik Wisata merupakan segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang dapat menjadi sasaran atau tujuan wisatawan. Daya Tarik Wisata sangat mempengaruhi *demand* atau jumlah wisatawan yang berkunjung ke suatu destinasi pariwisata. Menurut Karyono (1997) daya tarik wisata merupakan suatu hal yang berkaitan dengan *what to see* dan *what to do*, apa yang bisa dilihat dan apa yang bisa dilakukan oleh wisatawan yang berkunjung di destinasi tersebut<sup>35</sup>. Atraksi atau daya tarik wisata dapat berupa keindahan dan keunikan alam, budaya masyarakat, peninggalan bangunan sejarah, dan juga atraksi buatan manusia seperti, taman, sarana permainan dan hiburan yang memiliki keunikan dan berbeda dari daerah lain. Pembangunan daya tarik wisata dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi agar dapat menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.

### 1.5.5.3.2 Pelayanan Tambahan atau Jasa (*Ancillaries*)

Menurut Sugiyama (2011) *ancillaries* atau pelayanan tambahan adalah mencakup keberadaan pemerintah dan berbagai organisasi yang memfasilitasi dan mendorong pengembangan serta pemasaran dari suatu destinasi wisata. Organisasi yang terkait dengan pengembangan pariwisata antara lain seperti pihak pemerintah, dan asosiasi kepariwisataan. Sebagai contoh jika para wisatawan yang memerlukan jasa *tourism information* dapat mengunjungi pusat informasi di tempat-tempat tertentu, selain itu tersedianya toko-toko atau souvenir untuk para wisatawan membeli oleh-oleh pada saat wisatawan akan kembali ke daerah asalnya, dan juga lembaga-lembaga perhotelan dan pariwisata. Dengan adanya hal-hal pendukung ini disebabkan oleh jumlah pengunjung yang berkunjung di suatu tempat wisata, karena hal-hal tersebut dibutuhkan oleh pengunjung. Wisatawan akan semakin sering berkunjung dan mencari Daya Tarik Wisata

---

<sup>35</sup> Karyono, Hari. 1997. *Kepariwisataan*. Jakarta. PT Grasindo

(DTW) apabila di daerah tersebut wisatawan mendapatkan informasi atau pengetahuan baru mengenai tempat wisata tersebut, dan dapat merasakan keamanan dan terlindungi (*protection of tourism*).

#### **I.5.5.3 Fasilitas (*Amenities*)**

Amenitas Pariwisata menurut Permenpar Nomor 03 Tahun 2018 merupakan segala fasilitas penunjang yang memberikan kemudahan bagi wisatawan untuk memenuhi kebutuhan selama berwisata. Menurut Sunaryo (2013) amenitas merupakan fasilitas dasar yang memiliki fungsi agar para wisatawan dapat merasa nyaman di destinasi tersebut. *Amenities* ini adalah fasilitas-fasilitas seperti transportasi, hotel, dan yang lainnya. Jika disuatu daerah tidak ada *amenities* yang memadai, maka pengunjung tidak akan betah berkunjung di tempat wisata tersebut. Jika *amenitiesnya* tidak berkualitas dan memadai, maka pengunjung tidak akan tertarik untuk mengunjungi daerah tersebut, begitu pula sebaliknya, jika tidak ada pengunjung maka *amenities* pun tidak akan berkembang, hal ini dikarenakan tidak adanya pemasukan atau keuntungan<sup>36</sup>.

#### **I.5.6 Pengembangan Pariwisata dengan Kebutuhan Masyarakat**

Pengembangan pariwisata merupakan suatu usaha pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melihat potensi daerah dan kebutuhan masyarakat daerah tersebut. Keterkaitan pengembangan pariwisata dengan kebutuhan masyarakat adalah dengan adanya pengembangan pariwisata, maka kebutuhan masyarakat yang daerahnya dijadikan sasaran program pengembangan pariwisata dapat terpenuhi dengan baik. Sehingga program dari pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam merencanakan suatu program, pemerintah harus melihat kebutuhan dari masyarakat yang daerahnya akan dijadikan sasaran dari program pengembangan pariwisata. Dalam hal ini teori kebutuhan Maslow memaparkan mengenai pemuasan kebutuhan didorong oleh kekuatan motivasi, yaitu motivasi

---

<sup>36</sup> Sunaryo, Bambang. 2013. Intisari Pemasaran dan Unsur-unsur Pemasaran. Cetakan Ketiga. Bandung: Linda karya



kekurangan (*deficiency growth*) dan motivasi perkembangan (*motivation growth*). Motivasi kekurangan sendiri merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk memenuhi kekurangan yang dialami. Sedangkan motivasi perkembangan merupakan motivasi yang tumbuh dari dasar diri manusia untuk mencapai tujuan dengan didasarkan kapasitasnya dalam berkembang.

Dari uraian diatas, maka masyarakat memiliki peran yang penting dalam keberhasilan pembangunan kepariwisataan, serta untuk mendukung keberhasilan pembangunan kepariwisataan, maka setiap usaha atau program pembangunan atau pengembangan yang dilakukan harus memperhatikan kebutuhan masyarakat, potensi, posisi, dan peranan masyarakat sebagai subyek atau pelaku pengembangan itu sendiri. Sehingga program pengembangan pariwisata dengan melihat kebutuhan masyarakat merupakan suatu langkah penting yang perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dan terarah untuk menyiapkan masyarakat semakin memiliki kapasitas dari kemandirian, dan juga berperan aktif dalam mendukung upaya pembangunan kepariwisataan

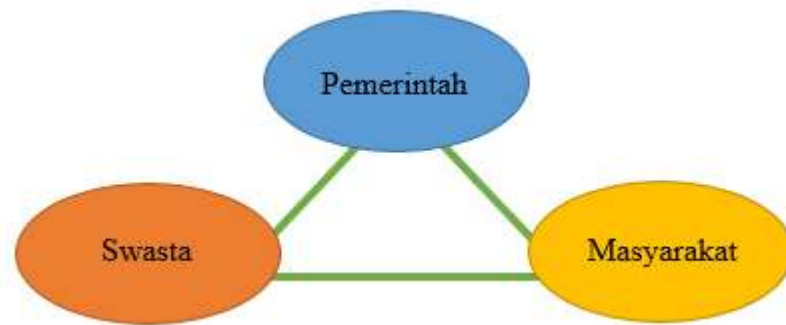
### **I.5.7 *Community Development* dalam Pengembangan Pariwisata**

*Community Development* atau pengembangan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu usaha yang terintegrasi antara masyarakat dengan pemerintah dan pihak lain untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek dengan memanfaatkan sumber daya yang ada disekitar masyarakat, sehingga masyarakat dapat menjadi lebih mandiri. Keterkaitan *community development* dengan pengembangan pariwisata adalah dengan adanya *community development* maka masyarakat dapat meningkatkan kapasitasnya menjadi lebih mandiri dan dapat memanfaatkan sumber daya pariwisata yang ada disekitarnya, sehingga dapat memperoleh manfaat dari program tersebut.

Seperti yang tertulis dalam buku Pedoman Kelompok Sadar Wisata bahwa kegiatan pembangunan atau pengembangan kepariwisataan melibatkan berbagai peran dari seluruh pemangku kepentingan yang ada dan terkait. Pemangku

kegiatan yang dimaksud meliputi 3 (tiga) pihak yaitu, Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat, dengan peran dan fungsinya masing-masing<sup>37</sup>.

Gambar I.1 Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan Pariwisata



Jabaran peran dan fungsi masing-masing pemangku kepentingan sebagai berikut:

1. Pemerintah, sesuai dengan tugas dan kewenangannya menjalankan peran dan fungsinya sebagai fasilitator dan pembuat peraturan (regulator) dalam kegiatan pembangunan kepariwisataan
2. Pihak Swasta (pelaku usaha/industri pariwisata) dengan sumber daya, modal, dan jejaring yang dimilikinya menjalankan peran dan fungsinya sebagai pengembang dan atau pelaksana pembangunan kegiatan kepariwisataan
3. Masyarakat, dengan sumber daya yang dimilikinya, baik itu berupa adat, tradisi, dan budaya serta kapasitasnya, memiliki peran sebagai tuan rumah, namun juga sekaligus memiliki kesempatan sebagai pelaku pengembangan kepariwisataan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Dari uraian tersebut, menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kedudukan dan peran penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan kepariwisataan

<sup>37</sup> Rahim, Firmansyah. 2012. Pedoman Kelompok Sadar Wisata. Jakarta. Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

dan untuk mendukung keberhasilan pembangunan kepariwisataan, maka setiap usaha atau program pembangunan atau pengembangan yang dilakukan harus memperhatikan potensi, posisi, dan peranan masyarakat sebagai subyek atau pelaku pengembangan itu sendiri. Sehingga program pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan merupakan suatu langkah penting yang perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dan terarah untuk menyiapkan masyarakat semakin memiliki kapasitas dari kemandirian, dan juga berperan aktif dalam mendukung upaya pembangunan kepariwisataan di tingkat lokal, regional, dan nasional.

Selain itu, pemberdayaan masyarakat dalam konteks pembangunan kepariwisataan dapat didefinisikan sebagai upaya penguatan dan peningkatan kapasitas, peran, dan inisiatif masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan, agar dapat berpartisipasi dan berperan aktif sebagai subjek atau pelaku maupun sebagai penerima manfaat dalam pengembangan kepariwisataan secara berkelanjutan<sup>38</sup>. Dari penjelasan tersebut, ditegaskan posisi penting dari masyarakat dalam kegiatan pembangunan yaitu, masyarakat sebagai subjek atau pelaku pembangunan, dan masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan.

Masyarakat sebagai subyek pembangunan, memiliki arti bahwa masyarakat menjadi pelaku penting yang harus terlibat secara aktif dalam proses perencanaan dan pengembangan kepariwisataan, bersama-sama dengan pemangku kepentingan terkait lainnya, baik dari pemerintah maupun swasta. Dalam fungsinya sebagai subjek pembangunan, maka masyarakat memiliki peran dan tanggung jawab untuk bersama-sama mendukung keberhasilan dari program pengembangan kepariwisataan di daerahnya. Sedangkan masyarakat sebagai penerima manfaat memiliki arti bahwa masyarakat diharapkan dapat memperoleh nilai manfaat ekonomi yang berarti dari pengembangan kegiatan kepariwisataan agar dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat tersebut.

Dari pemaparan di atas jelas bahwa masyarakat berada dalam posisi yang sangat penting didalam pengembangan pariwisata. Ketika *community development* hadir untuk pengembangan masyarakat maka masyarakat akan lebih menjadi

---

<sup>38</sup> Renstra Dit. Pemberdayaan Masyarakat. 2010

mandiri dan dapat menentukan sikap untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dalam hal ini sumber daya pariwisata yang berada di daerah Kawasan Cagar Budaya berupa Kampung Majapahit akan dapat lebih dimanfaatkan dan dirawat agar wisatawan tertarik untuk mengunjungi destinasi wisata tersebut, sehingga pariwisata di daerah tersebut dapat berkembang.

Dari pemaparan diatas, maka hubungan antara pengembangan pariwisata dengan *community development* dapat dilihat dari keterkaitan masing-masing pilar pengembangan pariwisata dan prinsip dari *community development*. Berikut adalah tabel yang menggambarkan keterkaitan antara masing-masing prinsip *community development* dengan pilar-pilar pengembangan pariwisata di Kampung Majapahit, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto:

Tabel 1.5 Hubungan antara *Community Development* dengan Pengembangan Pariwisata

Prinsip-Prinsip <i>Community Development</i>	Pilar Pengembangan Pariwisata		
	<i>Attraction</i> (Daya Tarik)	<i>Ancillaries</i> (Pelayanan Tambahan)	<i>Amenities</i> (Fasilitas)
Hak Asasi Manusia	√	√	√
Pembangunan Terpadu	√	√	√
Pemberdayaan	√	√	√
Keberlanjutan	√	√	√
Partisipasi	√	√	√
Kemandirian	√	√	√

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa adanya keterkaitan antara prinsip *community development* dengan pilar pengembangan pariwisata yang dilakukan di Kampung Majapahit Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sehingga dapat dijelaskan hubungan antara prinsip-prinsip *community development* dengan pilar-pilar pengembangan pariwisata sebagai berikut;

#### **1.5.6.1 Prinsip Hak Asasi Manusia dengan Pilar Pengembangan Pariwisata**

Dalam pengembangan pariwisata yang sedang gencar dilakukan oleh pemerintah guna mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh daerah serta

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah, maka pemerintah dalam melaksanakan pengembangan pariwisata juga harus melihat prinsip Hak Asasi Manusia dengan pilar pengembangan pariwisata dapat dilihat sebagai berikut;

- a. Hubungan antara Hak Asasi Manusia (HAM) dengan pilar pengembangan pariwisata berupa daya tarik. Hak asasi manusia dalam pembangunan suatu daya tarik wisata juga harus memperhatikan terjaminnya pemenuhan HAM masyarakat tersebut. Hak-hak yang dimiliki masyarakat mulai dari hak untuk memilih, berperan atau terlibat, menerima manfaat sampai hak atas kepemilikan lahan sehingga pembangunan tersebut memberikan manfaat tanpa memberatkan masyarakat dan pembangunan daya tarik wisata sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam rangka mengembangkan pariwisata dan terciptanya kesejahteraan masyarakat.
- b. Pemenuhan HAM dalam pembentukan fasilitas pendukung dapat terwujud ketika masyarakat mendapatkan sosialisasi dan pelatihan dalam pembangunan fasilitas pendukung seperti, warung atau kios kecil dan juga *tourism information center*, karena masyarakat itu sendiri yang mengerti akan informasi wisata yang ada dilingkungannya, sehingga pemerintah dan organisasi yang terlibat harus melibatkan masyarakat. Misalnya pada pengelolaan, masyarakat dibantu dengan POKDARWIS melakukan pengelolaan tempat tinggal mereka yang menjadi destinasi wisata agar tetap dapat menjadi destinasi wisata agar masyarakat dapat menerima manfaat dari pembangunan destinasi wisata tersebut.
- c. Dalam pembangunan fasilitas, pemenuhan HAM dapat diwujudkan melalui keterlibatan masyarakat tanpa pemaksaan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan juga wisatawan, sehingga masyarakat dapat menyampaikan saran atau masukan agar pembangunan fasilitas yang dilakukan dapat sepenuhnya memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga dapat menarik wisatawan untuk mengunjungi destinasi wisata tersebut.

### **I.5.6.2 Prinsip Pembangunan Terpadu dengan Pilar Pengembangan Pariwisata**

Dalam pengembangan pariwisata yang sedang gencar dilakukan oleh pemerintah juga harus melihat prinsip pembangunan terpadu dalam melaksanakan pengembangan pariwisata, hubungan antara prinsip pembangunan terpadu dengan pilar pengembangan pariwisata dapat dilihat sebagai berikut;

- a. Hubungan prinsip yang pertama yaitu prinsip pembangunan terpadu dengan daya tarik wisata dapat terwujud ketika pembangunan daya tarik wisata dilakukan oleh berbagai pihak termasuk masyarakat yang telah terintegrasi, sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan jelas kegiatan yang akan dilaksanakan dilingkungannya dan sudah sepakat dengan pihak yang terlibat dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti, ekonomi terkait dengan anggaran peyelenggaraan, kondisi lingkungan budaya sosial masyarakat desa itu sendiri terkait renovasi bangunan depan hingga kesiapan masyarakat desa secara perseorangan ketika tempat tinggal mereka dijadikan destinasi wisata yang nantinya banyak dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah dan berbagai latar belakang.
- b. Pembangunan terpadu dalam pelayanan tambahan dapat terwujud apabila pemerintah dan pihak lain yang terlibat melakukan pembinaan kepada masyarakat karena masyarakat yang menjadi subjek dari pembangunan. Sehingga dengan adanya pembinaan yang diberikan kepada masyarakat, masyarakat dapat mengelola tempat tinggalnya yang menjadi destinasi wisata dengan baik agar tujuan dari pengembangan wisata dapat tercapai. Pembangunan terpadu dengan pelayanan tambahan atau *ancillaries* bisa terwujud apabila pihak pemerintah, masyarakat dan swasta yang terlibat dalam pengembangan pariwisata telah tercapai kesepakatan bersama dalam pembangunan pelayanan tambahan guna menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, baik dalam segi ekonomi, sosial dan budaya. Sehingga dalam pembangunan pelayanan tambahan, masyarakat dapat menerima manfaat, dan tujuan dari pengembangan pariwisata juga dapat tercapai.

- c. Pembangunan terpadu dengan fasilitas atau *amenities*, hubungan ini dapat terwujud apabila dalam pembangunan fasilitas sudah adanya kesepakatan bersama dan usaha bersama yang terjalin oleh berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan fasilitas umum/pariwisata dengan menyesuaikan kondisi lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat. Sehingga pembangunan atau pengembangan pariwisata dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penempatan fasilitas pariwisata juga harus mempertimbangkan aspek budaya dan ekonomi masyarakat lingkungan tersebut, terkhususnya terkait dengan penganggaran pembangunan, sehingga pembangunan fasilitas pariwisata dapat menguntungkan masyarakat dan juga wisatawan tanpa ada yang merasa dirugikan.

### **I.5.6.3 Prinsip Pemberdayaan dengan Pilar Pengembangan Pariwisata**

Prinsip yang ketiga yang harus diperhatikan pemerintah dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata adalah prinsip pemberdayaan, hubungan antara prinsip pembangunan terpadu dengan pilar pengembangan pariwisata dapat dilihat sebagai berikut;

- a. Hubungan prinsip ketiga, yaitu pemberdayaan dengan tiga pilar pengembangan pariwisata. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daya tarik wisata dapat terwujud apabila masyarakat diberikan kesempatan dan juga dorongan untuk memanfaatkan daya tarik wisata yang ada di lingkungannya, sehingga masyarakat mendapatkan manfaat seperti meningkatnya pendapatan masyarakat di daerah tersebut.
- b. Prinsip pemberdayaan dengan pembangunan pelayanan tambahan dapat diwujudkan dengan melibatkan dan mendorong masyarakat untuk mendukung pengembangan pariwisata seperti membangun atau menciptakan usaha seperti toko souvenir atau yang lain, sehingga pembangunan pelayanan tambahan dalam rangka pengembangan pariwisata dapat bermanfaat bagi masyarakat.

- c. Sedangkan terwujudnya pemberdayaan dalam pembangunan fasilitas atau *amenities* dapat berupa pemberian kesempatan yang luas dan dukungan bagi masyarakat dalam hal pemanfaatannya. Sehingga pemberdayaan dapat dikatakan benar-benar memberdayakan masyarakat ketika masyarakat sudah merasakan adanya dukungan dan manfaat.

#### **I.5.6.4 Prinsip Keberlanjutan dengan Pilar Pengembangan Pariwisata**

Hubungan prinsip keempat, yaitu prinsip keberlanjutan, hubungan antara prinsip keberlanjutan dengan pilar pengembangan pariwisata dapat dilihat sebagai berikut;

- a. Keberlanjutan dengan tiga pilar pengembangan pariwisata. Keberlanjutan dalam pembangunan daya tarik wisata dapat terwujud apabila pembangunan tersebut dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan lingkungan sekitar, hal ini harus dilakukan agar keseimbangan ekologis dapat tetap terjaga yang kemudian didukung dengan gaya hidup masyarakat yang dapat menjaga keberlangsungan lingkungannya.
- b. Keberlanjutan dalam pembangunan pelayanan tambahan, hal ini dapat terwujud apabila dalam pembangunan pelayanan tambahan seperti masyarakat yang memiliki usaha toko souvenir mengutamakan bahan-bahan yang ramah dengan lingkungan sekitar, dan juga penggunaan sumber daya dengan bijak tanpa menyebabkan limbah.
- c. Keberlanjutan dalam pembangunan fasilitas dapat diwujudkan melalui pemerhatian terhadap kondisi atau kelangsungan lingkungan yang berkaitan dengan gaya hidup masyarakat, penggunaan lahan, dan perlindungan akan sumber daya alam.

#### **I.5.6.5 Prinsip Partisipasi dengan Pilar Pengembangan Pariwisata**

Hubungan prinsip kelima yaitu, prinsip partisipasi, hubungan antara prinsip partisipasi dengan pilar pengembangan pariwisata dapat dilihat sebagai berikut;

- a. Prinsip partisipasi dengan pilar pengembangan pariwisata yakni daya tarik. Hubungan ini dapat terwujud apabila dalam pembangunan daya tarik wisata memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk



terlibat mulai dari perencanaan hingga pemanfaatan, sehingga nantinya masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam kegiatan pengembangan pariwisata di daerahnya.

- b. Dalam pembangunan pelayanan tambahan, partisipasi masyarakat dapat berbentuk bantuan informasi kepada wisatawan yang berkunjung di wisata tersebut, selain itu partisipasi masyarakat juga bisa berupa memulai usaha baru yang berguna untuk mendukung progra pengembangan pariwisata yang ada di daerahnya, sehingga pengembangan pariwisata yang dilakukan dapat bermanfaat bagi masyarakat daerah itu sendiri.
- c. Sedangkan partisipasi dalam pembangunan fasilitas atau *amenities* masyarakat diberi kesempatan dalam memberikan saran, masukan, ataupun terlibat secara langsung dalam memanfaatkan pembangunan fasilitas, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mendukung program pengembangan pariwisata di daerah tersebut.

#### **I.5.6.6 Prinsip Kemandirian dengan Pilar Pengembangan Pariwisata**

Hubungan prinsip keenam yaitu prinsip kemandirian, hal ini perlu diperhatikan oleh pemerintah, masyarakat daerah yang akan dikembangkan dapat secara mandiri memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh daerahnya, karena masyarakat itu sendiri yang mengetahui potensi dari daerahnya. Hubungan antara prinsip keberlanjutan dengan pilar pengembangan pariwisata dapat dilihat sebagai berikut;

- a. Prinsip kemandirian dengan ketiga pilar pengembangan pariwisata. Prinsip kemandirian dalam pembangunan daya tarik wisata dapat terwujud apabila masyarakat dapat memanfaatkan potensi yang ada dengan segala keahlian dan juga sumber daya yang dimiliki.
- b. Dalam pembangunan pelayanan tambahan, kemandirian dapat berupa pemanfaatan yang dilakukan masyarakat mengenai sumber daya yang ada di lingkungannya, seperti halnya masyarakat yang memiliki informasi mengenai destinasi wisata tersebut dapat membuka jasa *tourism*

*information* atau masyarakat dapat membuka usaha seperti toko-toko kecil sampai toko *souvenir*.

- c. Kemandirian dalam pembangunan fasilitas umum atau pariwisata. Prinsip ini dapat terwujud ketika masyarakat mampu memanfaatkan potensi dan fasilitas yang ada dalam rangka menjalankan memenuhi kebutuhan wisatawan dan juga menjalankan usaha. Bentuk kemandirian dapat dilihat dari kesadaran dan inisiatif masyarakat dalam hal melakukan suatu tindakan dengan tujuan membangun lingkungannya.

Berdasarkan uraian hubungan antara prinsip *community development* dengan pilar pengembangan pariwisata dapat dipahami pengembangan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya kepariwisataan yang berada di daerahnya dan siap untuk mengembangkan sumber daya dengan didasarkan kolektivitas dan kesadaran masyarakat yang terintegrasi dengan kewenangan pemerintah dalam hal pembangunan terkhususnya dalam pemenuhan kebutuhan agar masyarakat dapat menerima manfaat dari program tersebut. Sehingga masyarakat dapat mendukung penuh program pengembangan pariwisata guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

## **I.6 Definisi Konsep**

Berdasarkan kerangka konseptual dan perumusan masalah yang telah dijelaskan, dalam mempermudah pemahaman konsep yang ada pada penelitian ini, maka dapat disusun pengertian atau yang disebut definisi konsep. Perumusan definisi konsep sebagai berikut:

### **I.6.1 Inisiatif Pemerintah**

Inisiatif pemerintah adalah kemampuan pemerintah untuk menciptakan sesuatu yang baru atau menghasilkan suatu pemecahan masalah yang ada di daerahnya.

### **I.6.2 Relevansi Inisiatif**

Relevansi inisiatif adalah suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam membantu masyarakat untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat.

### **I.6.3 Kebutuhan Masyarakat**

Kebutuhan masyarakat adalah fenomena di masyarakat untuk tetap bertahan hidup, mulai dari asupan makan dan minum. Kebutuhan manusia menurut kebutuhan menurut tingkat kepentingannya terbagi menjadi tiga jenis, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

### **I.6.4 *Community Development***

*Community Development* adalah perspektif yang membahas tentang usaha pengembangan kapasitas masyarakat yang terintegrasi dengan otoritas pemerintah dalam rangka memperbaiki kehidupan masyarakat di suatu daerah agar menjadi lebih baik. Dengan melihat prinsip-prinsip *community development* sebagai berikut:

#### **I.6.4.1 Hak Asasi Manusia**

Masyarakat mempunyai hak yang berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan masyarakat mulai dari hak untuk berperan serta dalam kehidupan, hak untuk memperoleh perlindungan keluarga, dan hak untuk menentukan melaksanakan suatu kegiatan yang sesuai dengan kebutuhannya dan hak untuk memperoleh manfaat atas kegiatan.

#### **I.6.4.2 Pembangunan Terpadu**

Pembangunan terpadu adalah tindakan dan kesepakatan bersama antar berbagai pihak yang terlibat dan saling terintegrasi dalam pelaksanaannya, baik dari masyarakat ataupun pihak luar yang membantu dalam merencanakan suatu keputusan yang memiliki sifat multi-tujuan sebagai penyelesaian masalah yang sedang terjadi di suatu daerah.

### **I.6.4.3 Pemberdayaan**

Pemberdayaan adalah suatu kegiatan pengembangan masyarakat dengan inisiatif bantuan ataupun dukungan dari pemerintah kepada masyarakat seperti pemberian kesempatan, sumber daya, dan keterampilan, hingga memberikan tanggungjawab yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat atau kepemimpinan komunitas

### **I.6.4.4 Keberlanjutan**

Keberlanjutan adalah suatu kegiatan pembangunan yang memperhatikan kondisi lingkungan berkaitan dengan gaya hidup masyarakat, perlindungan akan sumber daya alam dan penggunaan lahan yang ada dengan memberikan arahan kepada masyarakat agar dapat menjaga keseimbangan ekologis dan keadilan sosial

### **I.6.4.5 Partisipasi**

Partisipasi adalah pemberian kesempatan atau pemberian ruang secara terbuka kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat menyampaikan seluruh ide atau gagasannya dalam upaya penyelesaian masalah untuk memajukan komunitasnya, dan menjamin pengembangan masyarakat dapat berjalan dengan lancar agar dapat mencapai tujuan jangka panjang

### **I.6.4.6 Kemandirian**

Kemandirian adalah kesadaran bagi masyarakat untuk melihat lingkungan sekitar dan menyelesaikan masalah yang ada di lingkungannya. Namun disisi lain inisiatif masyarakat untuk bergerak, melihat sumber daya sampai menyelesaikan suatu masalah menjadi hal yang ditekankan.

## **I.6.5 Pengembangan Pariwisata**

Pengembangan pariwisata adalah kegiatan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri dari rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/ kota. Dalam

pengembangan pariwisata dilaksanakan, pemerintah harus menetapkan kawasan strategis pariwisata. Dengan melihat pilar pengembangan pariwisata sebagai berikut:

#### **I.6.5.1 Daya Tarik**

Daya Tarik Wisata adalah segala suatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang dapat menjadi sasaran atau tujuan wisatawan yang dapat mempengaruhi *demand* atau jumlah wisatawan yang berkunjung ke suatu destinasi pariwisata.

#### **I.6.5.2 Pelayanan Tambahan atau Jasa (*Ancillaries*)**

*Ancillaries* atau pelayanan tambahan adalah keberadaan pemerintah dan berbagai organisasi yang memfasilitasi dan mendorong pengembangan serta pemasaran dari suatu destinasi wisata. Organisasi yang terkait dengan pengembangan pariwisata antara lain seperti pihak pemerintah, dan asosiasi kepariwisataan.

#### **I.6.5.3 Fasilitas (*Amenities*)**

Amenitas Pariwisata adalah segala fasilitas penunjang yang memberikan kemudahan bagi wisatawan untuk memenuhi kebutuhan selama berwisata. Amenitas merupakan fasilitas dasar yang memiliki fungsi agar para wisatawan dapat merasa nyaman di destinasi tersebut.

#### **I.6.6 Pengembangan Pariwisata dengan Kebutuhan Masyarakat**

Pengembangan pariwisata dengan kebutuhan masyarakat adalah suatu keterkaitan yang sangat penting agar program yang dilakukan oleh pemerintah dapat berjalan secara berkesinambungan, dan program dari pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah dapat bermanfaat bagi masyarakat.

#### **I.6.7 *Community Development* dalam Pengembangan Pariwisata**

Merupakan kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya kepariwisataan yang berada di daerahnya dan siap untuk mengembangkan sumber daya dengan didasarkan kesadaran masyarakat

yang terintegrasi dengan kewenangan pemerintah dalam hal pembangunan agar masyarakat dapat menerima manfaat dari program tersebut.

## **I.7 Metode Penelitian**

Metode penelitian secara sederhana dapat diartikan suatu cara kerja yang bertujuan untuk dapat memahami objek dari ilmu yang bersangkutan, sehingga dalam suatu penelitian keberadaan metode menjadi mutlak yang dibutuhkan, karena fakta – fakta sosial harus dikupas hingga ke intinya, dan diamati dalam suatu kerangka pedoman yang spesifik. Pengukuran yang tepat dan diamati pada suatu fakta yang dihubungkan dengan fakta lain yang relevan. Metode penelitian menjadi seperangkat petunjuk yang merupakan suatu strategi dalam rangka menemukan secara menyeluruh dan mendapatkan data yang diperlukan. Penggunaan metode penelitian itu sendiri berfungsi untuk menjawab permasalahan secara ilmiah, sehingga dapat memperoleh pengetahuan tentang kebenaran ilmiah, sehingga dapat memperoleh pengetahuan tentang kebenaran ilmiah itu sendiri.

Dalam penelitian ini mengkaji permasalahan terkait dengan Relevansi Inisiatif Pemerintah dengan Kebutuhan Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata di Kampung Majapahit Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto yang dilihat dari Perspektif *Community Development* dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif merupakan suatu cara untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah sosial. Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk memahami situasi, peristiwa, kelompok, peran, ataupun interaksi sosial tertentu (Locke, Spirduso & Silverman, 1987)<sup>39</sup>. Penelitian kualitatif mencari suatu informasi dengan mengumpulkan data dengan berbicara langsung kepada orang-orang dan melihat mereka bertingkah laku dalam konteks natural inilah yang menjadi karakteristik utama dari penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk meneliti kebenaran dan keaslian yang ada pada fenomena yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya dan

---

<sup>39</sup> J.W. Creswell. 2014. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Diterjemahkan oleh Fawaid dan Pancasari. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 4

merupakan proses yang interaktif. Selain itu penelitian kualitatif berupaya membuat gambaran yang kompleks dari suatu masalah atau isu yang sedang diteliti. Sehingga penelitian kualitatif diharapkan dapat membuat suatu model visual dari berbagai aspek mengenai proses atau fenomena utama yang sedang diteliti.

### **I.7.1 Tipe Penelitian**

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan, maka tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan suatu variable, gejala fenomena, atau keadaan secara apa adanya dan juga menjelaskan mengenai masalah atau objek tertentu secara rinci, sehingga dalam penerapannya dapat menggambarkan suatu keadaan yang mungkin ada dalam situasi tertentu<sup>40</sup>. Informasi dalam penelitian deskriptif bersumber pada informan-informan yang berada di lapangan tanpa tergantung pada pengukuran menggunakan angka. Penelitian deskriptif ini digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu Relevansi Inisiatif Pemerintah dengan Kebutuhan Masyarakat dalam Pengembangan Kampung Majapahit di Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto dari Perspektif *Community Development* secara rinci.

### **I.7.2 Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih oleh peneliti yaitu di Kampung Majapahit, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto yang ditetapkan secara purposive sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Dalam pemilihan lokasi penelitian juga mempertimbangkan masalah etis yaitu, memilih lokasi tanpa adanya pengaruh kepentingan pribadi untuk hasil akhir penelitian.

Kampung Majapahit di Desa Bejjong dan Desa JatiPasar, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto menjadi lokasi dalam penelitian ini karena adanya pertimbangan bahwa Kampung Majapahit tersebut merupakan salah satu bentuk pengembangan dari destinasi wisata cagar budaya di daerah Trowulan

---

<sup>40</sup> Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2005. Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan. Jakarta: Prenadamedia Group. Hal 17

yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang mempunyai potensi wisata cagar budaya yang melimpah dan letak yang cukup strategis, namun belum dapat menunjukkan perkembangan yang signifikan.

Selain di Kecamatan Trowulan, penelitian ini dilakukan di beberapa Dinas yang terkait dengan pelaksanaan pengembangan pariwisata yang berupa Kampung Majapahit yaitu Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto sebagai penanggung jawab utama perencanaan pembangunan pariwisata. Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan pada berbagai pertimbangan dalam rangka usaha mendapatkan keabsahan dalam mendapatkan data yang dibutuhkan.

### **I.7.3 Teknik Penentuan Informan**

Dalam penelitian kualitatif ada hal yang lebih diutamakan, yakni keleluasaan, cakupan rentangan informasi, dan juga penggunaan istilah pada informan pada penentuan sampel. Selain itu, penentuan informan merupakan aspek yang penting dalam penelitian kualitatif, hal ini dikarenakan informan adalah sumber informasi, sehingga banyak informasi yang harus didapatkan dari berbagai pihak yang terlibat dalam permasalahan penelitian.

Dalam teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive*, dimana informan yang dipilih adalah pihak yang dianggap mengetahui dan memahami tentang permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini. Teknik penentuan informan secara *purposive* digunakan dengan tujuan memperluas deskripsi informasi dan mencari variasi informasi yang dimungkinkan ada, dan juga untuk mengetahui dan mengulas lebih dalam mengenai Relevansi Inisiatif Pemerintah dengan Kebutuhan Masyarakat dalam Pengembangan Kampung Majapahit di Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto dari Perspektif *Community Development*.

Berdasarkan uraian di atas, maka sampel sumber data dalam penelitian ini merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Mojokerto, khususnya di kawasan wisata Kampung Majapahit. Peneliti memilih secara *purposive* informan-informan yang dipilih ini merupakan



anggota dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan pengembangan pariwisata di Kampung Majapahit, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, mulai dari Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Mojokerto. Informan-informan yang dipilih sebagai berikut:

1. Ibu Mega S, sebagai Kepala Seksi Daya Tarik Wisata Disporabudpar Kabupaten Mojokerto
2. Ibu RR. Fety S, sebagai Kepala Bidang Kebudayaan Disporabudpar Kabupaten Mojokerto
3. Ibu Lukita, Masyarakat Desa Jatipasar
4. Ibu Irna, Masyarakat Desa Jatipasar
5. Bapak Sumardi, Masyarakat Desa Jatipasar
6. Bapak Doni, Masyarakat Desa Jatipasar
7. Ibu Marlina, Masyarakat Desa Jatipasar
8. Bapak Wahyudi, Masyarakat Desa Bejjong
9. Ibu Asmina, Masyarakat Desa Bejjong
10. Bapak Yudi, Masyarakat Desa Bejjong
11. Ibu Nur Hayati, Masyarakat Desa Bejjong
12. Ibu Widya, Masyarakat Desa Bejjong

#### **I.7.4 Teknik Pengumpulan Data**

Data menjadi hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena dengan adanya data, peneliti dapat mengetahui secara langsung dan lebih detail mengenai fenomena sosial yang terjadi di lapangan. Menurut Jhon W. Creswell, dalam prosedur pengumpulan data dalam penelitian kualitatif terdapat empat jenis strategis sebagai berikut<sup>41</sup>;

##### **I.7.4.1 Observasi**

Dalam pengumpulan data menggunakan metode observasi adalah ketika peneliti langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengamatan terkait perilaku

---

<sup>41</sup> J.W.Creswell. 2014. *Research Design* Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Diterjemahkan oleh Fawaid dan Pancasari. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 166

dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian<sup>42</sup>. Dalam pengamatan ini, peneliti merekam dan/atau mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur, misalnya dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti terkait aktivitas-aktivitas di lokasi penelitian.

Di dalam penelitian ini, jenis observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah partisipan yang sebagai pengamat dan non-partisipan sebagai pengamat. Peneliti berperan sebagai salah satu pengunjung untuk melihat dan mengamati seluruh kegiatan yang sedang berlangsung, kondisi kampung, dan juga lingkungan disekitarnya, termasuk juga prasaran dan fasilitas yang ada di Kampung Majapahit, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto sebagai hal penunjang yang bisa dapat diamati dan dicatat oleh peneliti untuk mendapatkan data dan informasi primer yang relevan, serta dapat mendukung data yang lain.

#### **I.7.4.2 Wawancara**

Pengumpulan data primer menggunakan metode wawancara merupakan pengumpulan data dengan cara *face-to-face* interview (wawancara berhadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka lewat telepon, atau terlibat dalam *focus group* interview (wawancara dalam kelompok tertentu). Wawancara yang dilakukan tentu memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang dirancang dengan tujuan untuk memunculkan pandangan dan opini dari para partisipan<sup>43</sup>.

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai Seksi Daya Tarik Wisata (Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Mojokerto), Kelompok Sadar Pariwisata Kabupaten Mojokerto, serta perwakilan masyarakat dari dua desa yaitu, Desa Bejijong, dan Desa Jatipasar yang merupakan sasaran dari program Kampung Majapahit.

---

<sup>42</sup> J.W.Creswell. 2014. *Research Design* Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Diterjemahkan oleh Fawaid dan Pancasari. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 254

<sup>43</sup> *Ibid.* Hal 254

### **I.7.4.3 Studi Dokumen**

Didalam penetiannya, peneliti juga mengumpulkan data atau informasi melalui dokumen-dokumen publik atau privat yang berhubungan dengan fenomena permasalahan dalam penelitian. Dokumen-dokumen publik tersebut dapat berupa koran, majalah, ataupun laporan kantor. Sedangkan dokumen privat tersebut berupa buku harian, surat, diari, dan *e-mail*<sup>44</sup>. Dalam penelitian ini, peneliti telah mengumpulkan dokumen sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
3. Berita Resmi Statistik Perkembangan Pariwisata dan Transportasi Nasional Agustus 2018;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 260/M/2013 tentang Penetapan Satuan Ruang Geografis Trowulan sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional. Pemkab Mojokerto;
5. Renstra Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat 2010;
6. Statistik Pariwisata Provinsi Jawa Timur 2017;
7. Laporan Pengunjung Cagar Budaya dan Museum Jawa Timur 2016;
8. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 36 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto Untuk Pembangunan Rumah Majapahit;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto 2016-2021.

### **I.7.4.4 Materi Audio dan Visual**

Jenis pengumpulan data terakhir ini dapat berupa foto, objek seni, videotape, atau segala jenis suara atau bunyi. Dalam data ini dapat memberikan

---

<sup>44</sup> J.W.Creswell. 2014. *Research Design* Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Diterjemahkan oleh Fawaid dan Pancasari. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 255

peluang kepada partisipan untuk langsung berbagi pengalamannya, dan materi audio-visual merupakan materi kreatif yang dibuat dengan penuh perhatian.

### **I.7.5 Teknik Analisis Data**

Analisis data kualitatif utamanya melibatkan pengklasifikasian benda, peristiwa, dan orang, serta properti lain yang dapat mencirikan ketiganya. Peneliti dalam menganalisis data juga berusaha untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan pola-pola dan tema-tema dari sudut pandang partisipan<sup>45</sup>. Sehingga melalui analisis data, data yang sudah diperoleh oleh peneliti yang kemudian diolah melalui proses analisis dapat membentuk kesimpulan yang tepat akan suatu fenomena di lapangan.

Menurut John W. Creswell, analisis data terdiri dari beberapa langkah, terdapat enam langkah dalam penelitian kualitatif sebagai berikut<sup>46</sup>;

Langkah 1 : Mengelola dan mempersiapkan data untuk dianalisis.

Data yang sudah dikumpulkan kemudian dikelola untuk dianalisis dengan melibatkan transkrip wawancara, mengumpulkan materi, mengetik data lapangan atau mengklasifikasikan data-data tersebut kedalam beberapa jenis berbeda sesuai sumber informasi.

Langkah 2 : Membaca keseluruhan data.

Peneliti membaca kembali keseluruhan data yang ada untuk membangun general sense atas informasi tersebut dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Biasanya peneliti menulis catatan-catatan khusus terkait gagasan umum yang diperoleh.

Langkah 3 : Memulai coding semua data.

Coding merupakan proses mengorganisasikan data dengan mengelola materi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Coding data terdiri dari beberapa langkah yaitu pengambilan data selama proses

---

<sup>45</sup> *Ibid.* Hal 281

<sup>46</sup> *Ibid.* Hal 265-267

pengumpulan data, mensegmentasi kalimat atau gambar dalam beberapa kategori serta memberi label kategori tersebut dalam istilah khusus.

Langkah 4 : Melanjutkan proses coding untuk mendeskripsikan setting, orang, kategori dan tema yang dianalisis.

Deskripsi merupakan usaha yang melibatkan penyampaian informasi secara detail tentang orang, lokasi ataupun peristiwa dalam setting tertentu lalu menerapkan proses coding untuk membuat sejumlah kecil tema atau kategori.

Langkah 5 : Menunjukkan keterkaitan deskripsi dan tema dalam laporan kualitatif

Menyampaikan hasil analisis dengan pendekatan naratif yang biasanya meliputi pembahasan tentang kronologi peristiwa, tema atau tentang hubungan antartema. Hal lain yang dapat digunakan peneliti kualitatif dalam menyajikan pembahasan suatu proses melalui visual, gambar atau tabel.

Langkah 6 : Menginterpretasi atau memaknai data

Merupakan langkah terakhir dalam proses analisis data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut (Wolcott, 1994). Pertanyaan-pertanyaan yang lebih lanjut akan membantu peneliti mengungkap esensi dari suatu gagasan. Hal ini dapat berupa interpretasi pribadi peneliti, dengan berpijak pada fakta bahwa peneliti membawa kebudayaan, sejarah, dan pengalaman pribadinya ke dalam penelitiannya. Interpretasi sendiri juga berupa makna yang berasal dari perbandingan antara hasil penelitian dengan informasi dari literatur atau teori. Pada tahap ini peneliti memberikan penegasan tentang informasi yang ada baik membenarkan maupun menyangkal.

### **I.7.6 Teknik Uji Keabsahan Data**

Teknik uji keabsahan data atau validitas dan reabilitas data merupakan salah satu kekuatan penelitian kualitatif yang didasarkan pada penentuan apakah yang didapat akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca (Creswell &

Miller, 2000). Sehingga teknik uji keabsahan data juga menguupayakan pemeriksaan akurasi hasil penelitian dengan prosedur tertentu kemudian mengindikasikan konsistensi pendekatan yang telah digunakan jika diterapkan di proyek lainnya.

Dalam penelitian ini, teknik uji keabsahan data yang digunakan adalah metode triangulasi (triangulate) data yang merupakan teknik memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber yang berbeda-beda untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren, dan jika tema-tema yang dibangun tersebut sejalan dengan perspektif partisipan maka dapat menambah validitas peneliti